

Pengaruh Implementasi Dan Pengawasan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Kinerja Inspektorat Dalam Reviu Laporan Keuangan Daerah Di Kabupaten Cirebon Tahun 2013

Oleh :
Febby Akbar & Bambang Haru Purwanto

Abstract

Effectiveness review of the financial statements is affected by two aspects, namely the independence of the Regional Inspectorate as the executor of the reviews and competence of the employees of the Inspectorate of the financial accounting system. But there are other factors related to the effectiveness review, the supervision and implementation of the financial system by SKPDs akuntanis. This study aims to determine the effect of the implementation and supervision together on the effectiveness of the inspectorate's performance in the review of financial statements inspectorate Cirebon area in 2013. The research method used in the study using an explanatory survey method (explanatory survey) with path analysis (Path Analysis) which is supported by the study of literature (bibliographic).

The results showed that the effectiveness of the performance of the inspectorate in the review of financial statements in the areas affected by the implementation and supervision of the financial accounting system. The magnitude of the effect of the implementation of the financial accounting system by 26.7%. The magnitude of the effect of monitoring the implementation of the financial accounting system by 43.4%. This means that the effectiveness of the performance of the inspectorate in the review of financial statements in the area influenced by variable implementation and supervision of the implementation of the financial accounting system was 70.1%.

Keywords: implementation, monitoring, review and financial accounting systems area.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Good Governance merupakan issue yang paling mengemuka terkait peningkatan kualitas pelayanan, transparansi dan akuntabilitas diberbagai sektor publik. Komitmen dari pemerintah untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme diamanatkan oleh MPR dalam ketetapan No. XI/MPR/1998 dan undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN sudah menjadi agenda yang harus dilaksanakan guna tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan konsolidasi laporan

keuangan yang disusun oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dihasilkan dari suatu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui suatu mekanisme pengawasan, disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, yang dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008. Di dalam Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diatur bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan

revisi atas laporan keuangan. Selanjutnya hasil revisi tersebut menjadi dasar pertimbangan Bupati membuat pernyataan tanggung jawab kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ruang lingkup revisi meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan sistem pengendalian intern dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.

Fenomena yang ada berkaitan dengan pelaksanaan revisi mencakup dua aspek meliputi: aspek sistem dan aspek individu. Dari aspek sistem, Inspektorat Daerah kurang independen dalam melaksanakan tugasnya, inspektorat bertanggung jawab terhadap Kepala Daerah. Jika ada kecurangan yang dilakukan kepala daerah melalui kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), maka Inspektorat tidak dapat berbuat banyak dalam melaporkan hasil temuannya. Dari aspek individu, Pegawai Inspektorat Daerah memiliki kelemahan dalam hal wawasan dan pemahaman. Wawasan dan pemahaman mereka yang kurang mencukupi tentang proses pelaksanaan audit internal menyebabkan pelaksanaan audit internal tidak dilaksanakan secara benar. Disamping itu pada tingkat SKPD tidak jarang ditemukan adanya ketidaksesuaian pelaporan dengan sistem akuntansi keuangan daerah. Kesalahan yang terjadi disebabkan karena kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Implementasi dan Pengawasan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Efektivitas Kinerja Inspektorat Dalam Revisi Laporan Keuangan Daerah Di Kabupaten Cirebon Tahun 2013.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Ruang lingkup akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, penganalisaan, pengklasifikasian, pencatatan dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu

entitas, serta penafsiran terhadap hasil-hasilnya.

Masisi (1978), Glynn (1993) dalam Mardiasmo (2002:147-148) menjelaskan aturan dasar sistem akuntansi keuangan meliputi :

- a. Identifikasi kegiatan operasi yang relevan.
- b. Pengklasifikasian kegiatan operasi secara tepat penentuan waktu pengakuan untuk setiap jenis operasi (*timing of recognition*).
- c. Adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas.
- d. Menghitung pengaruh masing-masing operasi

2. Pengawasan

Menurut Saefullah (2006:318) menyatakan bahwa: "Fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya organisasi dipeergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi."

Pengawasan menurut Handyaningrat (2001: 144), dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengawasan dari dalam
- b. Pengawasan dari luar organisasi
- c. Pengawasan prefentif
- d. Pengawasan represif

Kegiatan pengawasan dilakukan oleh aparatur pemerintah yang telah ditunjuk untuk melakukan pengawasan, meliputi :

1. BPKP melakukan revisi atas laporan keuangan pemerintah pusat sebelum disampaikan ke presiden.
2. Menteri keuangan selaku bendahara umum negara menetapkan standar revisi atas laporan keuangan untuk pedoman dalam pelaksanaan revisi atas laporan keuangan oleh aparat pengawasan intern

- pemerintahan langsung dengan penjaminan kualitas (*quality assurance*).
3. Aparat pengawasan intern pemerintah melakukan pengawasan yang terkait Inspektorat jendral atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melaksanakan revidu atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga sebelum disampaikan menteri/pimpinan lembaga kepada menteri keuangan.
 4. Inspektorat provinsi melakukan revidu atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sebelum disampaikan gubernur kepada badan pemeriksa keuangan.
 5. Inspektorat kabupaten/kota melakukan revidu atas laporan keuangan pemerintah pusat sebelum disampaikan menteri keuangan.

3. Revidu Laporan Keuangan Daerah

Revidu merupakan penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan daerah yang dilakukan oleh inspektorat daerah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan sistem akuntansi instansi dan laporan keuangan pemerintah daerah telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus disusun dan disajikan sesuai dengan PP. Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai pengakuan, pengukuran dan pengungkapan dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam pelaksanaannya, LKPD disusun oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) berdasarkan konsolidasi laporan keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Revidu laporan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan kepada inspektorat.

Ruang lingkup revidu adalah sebatas penelaahan laporan keuangan dan

catatan akuntansi. Sedangkan sasaran revidu untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan, entitas pelaporan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi pemerintah.

Menurut Mustofa Kamal (2012:2) untuk mencapai tujuan revidu (meyakini keandalan informasi dan atau keyakinan terbatas) digunakan teknik revidu penelusuran angka, permintaan keterangan dan analitis. Sedangkan untuk mencapai tujuan audit (keyakinan memadai) diperlukan teknik audit sesuai dengan jenis.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008, Pasal 57 ayat (5), Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menetapkan standar revidu atas laporan keuangan.

C. METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisa jalur (*Path Analysis*) yang didukung dengan studi kepustakaan (bibliografis).

2. Variabel Penelitian

Variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat atau ukuran yang dimiliki atau didapatkan oleh satuan penelitian tentang suatu konsep tertentu. Pada penelitian ini variabel dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Variabel Independen (bebas)

Variabel independen (bebas) atau variabel X yaitu variabel yang diselidiki pengaruhnya. Variabel independen pada penelitian ini yaitu implementasi (X_1) dan pengawasan (X_2).

b. Variabel Dependen (terikat)

Variabel dependen (terikat) atau variabel Y yaitu variabel yang diramalkan akan timbul dalam hubungan fungsional dengan atau sebagai pengaruh dari variabel bebas. Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah Efektivitas Kinerja Inspektorat dalam revidu.

3. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Secara operasional, indikator masing-masing variabel penelitian diuraikan sebagai berikut:

- a. Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_1) adalah implementasi/penerapan penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP), meliputi: Identifikasi, klasifikasi, pengendalian sistem untuk menjamin reliabilitas dan pencatatan transaksi.
- b. Implementasi Pengawasan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_2) adalah Variabel diukur dengan beberapa pertanyaan tentang terkait pelaksanaan implementasi standar akuntansi pemerintah (SAP) meliputi: kegiatan pre-emptif, preventif dan represif.
- c. Efektivitas Kinerja Inspektorat dalam Reviu Laporan Keuangan Daerah (Y) adalah Variabel diukur dengan beberapa pertanyaan tentang Efektivitas Kinerja Inspektorat dalam melakukan reviu meliputi: Efektivitas ditinjau dari waktu pelaksanaan dan kualitas pelaksanaan reviu.

4. Populasi dan sampel

Populasi untuk penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil yang bertindak sebagai auditor di Inspektorat Kabupaten Cirebon pada bulan April tahun 2013 berjumlah 60 orang.

Menurut Arikunto (2006) jika populasi suatu penelitian kurang dari 100 maka lebih baik diambil semuanya sehingga merupakan penelitian populasi, tetapi jika populasi lebih dari 100 dapat diambil 10-15% atau 20-25%,

tergantung kemampuan peneliti mengambil sampel yang akan diteliti.⁽¹⁶⁾ Sampel pada penelitian ini berjumlah 60 orang.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini menggunakan kuesioner yang terdiri dari 3 macam, meliputi kuesioner implementasi, pengawasan dan efektivitas reviu. Sebelum dilakukan penelitian terlebih dahulu penulis melakukan uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji instrumen menunjukkan semua pernyataan valid dan ke-3 kuseioner dinyatakan reliabel.

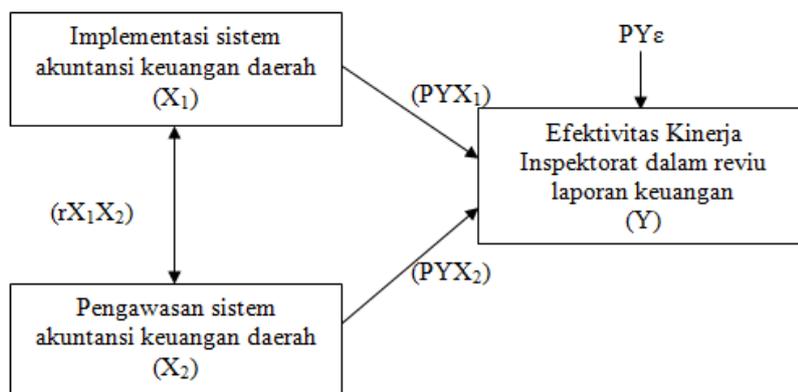
6. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

a. Analisa Deskripsi

Statistik deskriptif pada penelitian ini meliputi: rata-rata, standar deviasi, frekwensi minimum, dan frekuensi maksimum dari variabel-variabel yang diteliti.

b. Analisa Jalur (*Pathway*)

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Implementasi dan Pengawasan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Efektivitas Kinerja Inspektorat Dalam Reviu Laporan Keuangan Daerah di Kabupaten Cirebon Tahun 2013. **Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan analisis jalur (*Pathways*)**. Model analisis jalur pada penelitian ini sebagai berikut:



D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Uji Normalitas Sebaran

Hasil uji validitas selengkapnya seperti tabel di bawah ini :

JNS_KELAMIN		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
IMPLEMENTASI	PRIA	.081	32	.200*	.957	32	.230
	WANITA	.120	28	.200*	.967	28	.499
PENGAWASAN	PRIA	.118	32	.200*	.926	32	.052
	WANITA	.163	28	.056	.957	28	.293
EFEKTIVITAS	PRIA	.133	32	.160	.852	32	.046
	WANITA	.153	28	.092	.954	28	.247

a. Lilliefors Significance Correction

*. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel di atas dengan alat uji Kolmogorov – Smirnov maupun Shapiro – Wilk baik gender pria maupun wanita, tingkat signifikan atau nilai probabilitas variabel implementasi, pengawasan dan efektivitas berada pada interval 0,052 sampai 200 (di atas 0,05).

Dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

b. Uji Homogenitas

Pada penelitian ini uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan uji Lavane dengan hasil selengkapnya sebagai berikut :

		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
IMPLEMENTASI	Based on Mean	.704	1	58	.405
	Based on Median	.696	1	58	.408
	Based on Median and with adjusted df	.696	1	56.774	.408
	Based on trimmed mean	.700	1	58	.406
PENGAWASAN	Based on Mean	4.718	1	58	.051
	Based on Median	4.248	1	58	.054
	Based on Median and with adjusted df	4.248	1	46.469	.054
	Based on trimmed mean	4.220	1	58	.052
EFEKTIVITAS	Based on Mean	.438	1	58	.511
	Based on Median	.399	1	58	.530
	Based on Median and with adjusted df	.399	1	51.736	.530
	Based on trimmed mean	.361	1	58	.551

Berdasarkan pengukuran rata-rata (mean) nilai signifikansi atau probabilitas > 0,05. dapat disimpulkan bahwa data bersifat homogen (berasal dari populasi yang sama).

c. Pengujian Hipotesis Penelitian

Pengaruh implementasi, pengawasan, dan pengawasan terhadap efektivitas kinerja inspektorat dalam reviu Laporan Keuangan Daerah, khususnya angka *R square* di bawah ini:

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.837 ^a	.701	.690	5.39494

a. Predictors: (Constant), PENGAWASAN, IMPLEMENTASI

b. Dependent Variable: EFEKTIVITAS

Tabel di atas menunjukkan secara keseluruhan pengaruh variabel implementasi, pengawasan dan pengawasan terhadap efektivitas kinerja

inspektorat dalam reviu Laporan Keuangan Daerah.

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel yang

diteliti, dilakukan dengan menggunakan tabel anove sebagai berikut:

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3887.974	2	1943.987	66.791	.000 ^a
	Residual	1659.009	57	29.105		
	Total	5546.983	59			

a. Predictors: (Constant), PENGAWASAN, IMPLEMENTASI

b. Dependent Variable: EFEKTIVITAS

Berdasarkan tabel di atas, F_{hitung} (66,791) > F_{tabel} (3,187) dan nilai signifikansi (0,000) < 0,05, maka H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa implementasi dan pengawasan secara

bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas kinerja inspektorat dalam reviu Laporan Keuangan Daerah di inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2013

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27.601	5.111		5.400	.000
	IMPLEMENTASI	.346	.125	.344	2.773	.007
	PENGAWASAN	.403	.094	.534	4.310	.000

a. Dependent Variable: EFEKTIVITAS

Untuk melihat pengaruh implementasi secara parsial terhadap efektivitas kinerja inspektorat digunakan Uji T, sedangkan untuk melihat besarnya pengaruh, digunakan angka Beta atau *Standardized Coefficient*.

Berdasarkan hasil analisa SPSS di atas, t_{hitung} (2,002) > t_{tabel} (2,002) atau signifikansi (0,029) < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh implementasi secara parsial terhadap efektivitas kinerja inspektorat dalam reviu Laporan Keuangan Daerah. Besar skor pengaruh 0,344 atau 34,4%.

Berdasarkan hasil analisa SPSS di atas, t_{hitung} (4,310) > t_{tabel} (2,002) atau

signifikansi (0,000) < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang linier antara pengawasan dengan efektivitas kinerja inspektorat dalam reviu Laporan Keuangan Daerah di inspektorat Kabupaten Cirebon 0,534 atau 53,4%.

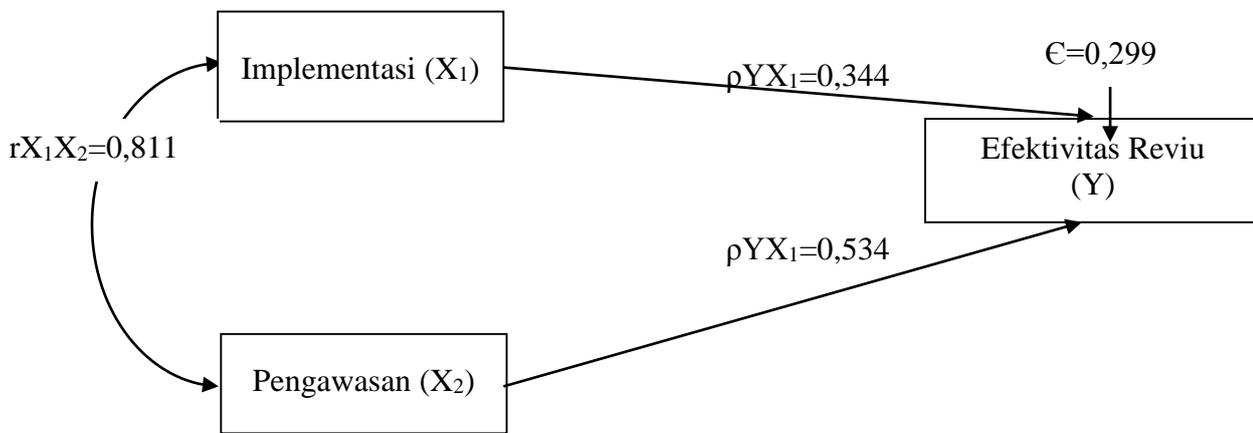
Pada penelitian ini analisis korelasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel yang diteliti meliputi variabel implementasi sistem akuntansi keuangan daerah, pengawasan dan efektivitas kinerja inspektorat dalam melakukan reviu laporan keuangan daerah. Hasil analisis korelasi selengkapnya sebagai berikut:

		EFEKTIVITAS	IMPLEMENTASI	PENGAWASAN
Pearson Correlation	EFEKTIVITAS	1.000	.777	.813
	IMPLEMENTASI	.777	1.000	.811
	PENGAWASAN	.813	.811	1.000
Sig. (1-tailed)	EFEKTIVITAS		.000	.000
	IMPLEMENTASI	.000		.000
	PENGAWASAN	.000	.000	
N	EFEKTIVITAS	60	60	60
	IMPLEMENTASI	60	60	60
	PENGAWASAN	60	60	60

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa skor korelasi tertinggi berada pada variabel pengawasan dengan efektivitas yaitu sebesar 0,813 hal ini menunjukkan adanya korelasi yang kuat dan searah. Disamping itu korelasi dua variabel bersifat signifikan karena angka signifikan $0,000 < 0,05$. Skor korelasi antara implementasi dengan efektivitas sebesar 0,777 hal ini menunjukkan adanya korelasi yang kuat dan searah. Disamping itu korelasi dua variabel bersifat signifikan karena angka

signifikan $0,000 < 0,05$. Skor korelasi antara implementasi dengan pengawasan sebesar 0,811 hal ini menunjukkan adanya korelasi yang cukup dan searah. Disamping itu korelasi dua variabel bersifat signifikan karena angka signifikan $0,000 < 0,05$.

Berdasarkan uraian di atas diagram jalur pengaruh implementasi, pengawasan dan pengawasan terhadap efektivitas kinerja inspektorat dalam reviu Laporan Keuangan Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:



Persamaan structural untuk diagram jalur diatas sebagai berikut:
 $Y = 0,777X_1 + 0,813X_2 + \epsilon$

Dimana:

Y = Efektivitas kinerja inspektorat X_1 = Implementasi
 X_2 = Pengawasan

ϵ = Besarnya pengaruh dapat di hitung sebagai berikut:

1) Pengaruh Implementasi (X_1) terhadap efektivitas kinerja inspektorat dalam reviu Laporan Keuangan Daerah (Y):

a) Pengaruh langsung X_1
 $PYX_1 = PYX_1^2 \times 100\%$
 $= (0,344)^2 \times 100\%$
 $= 0,118$
 $= 11,8\%$

b) Pengaruh tidak langsung X_1 melalui X_2
 $PYX_1 - PYX_2 = ((PYX_1) \times (rX_1X_2) \times (PYX_2))$
 $= ((0,344) \times (0,811) \times (0,534)) \times 100\%$
 $= 0,149 \times 100\%$
 $= 14,9\%$

c) Pengaruh total $X_1 = 11,8\% + 14,9\%$
 $= 26,7\%$

2) Pengaruh Pengawasan (X_2) terhadap efektivitas kinerja inspektorat dalam reviu Laporan Keuangan Daerah (Y):

a) Pengaruh langsung X_2
 $PYX_2 = PYX_2^2 \times 100\%$

$$= 0,534^2 \times 100\%$$

$$= 28,5\%$$

b) Pengaruh tidak langsung X_2 melalui X_1

$$PYX_2 - PYX_1 = ((PYX_2) \times (r_{X_1X_2}) \times (PYX_1))$$

$$= ((0,534) \times (0,811) \times (0,344)) \times 100\%$$

$$= 0,149 \times 100\%$$

$$= 14,9\%$$

d) Pengaruh total $X_2 = 28,5\% + 14,9\%$
 $= 43,4\%$

3) Pengaruh X (Pengaruh X_1 , X_2 secara bersama sama);

$$R^2_{X_1X_2} = 26,7\% + 43,4\%$$

$$R^2_{X_1X_2} = 70,1\%$$

4) Pengaruh variabel lain.

Prosentasi pengaruh variabel lain:

$$= PYC \times 100\%$$

$$= 0,299 \times 100\%$$

$$= 29,9\%$$

2. Pembahasan

Pembahasan tentang pengaruh dan pengawasan secara bersama-sama terhadap efektivitas kinerja Inspektorat dalam reviu Laporan Keuangan Daerah, terlebih dahulu akan di paparkan hasil penelitian kuesioner variabel (Y) efektivitas kinerja inspektorat dalam reviu laporan keuangan daerah.

Menurut Mustofa Kamal (2012:2) untuk mencapai tujuan reviu (meyakini keandalan informasi dan atau keyakinan terbatas) digunakan teknik reviu penelusuran angka, permintaan keterangan dan analitis meliputi bukti fisik, bukti dokumen, bukti analisis dan bukti keterangan. Kegiatan reviu laporan keuangan daerah hanya akan dapat berjalan dengan efektif jika seluruh SKPD mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan daerah yang berlaku. Disamping itu berjalannya mekanisme pengawasan yang dilakukan inspektorat terhadap implementasi sistem akuntansi keuangan daerah akan meminimalkan kesalahan SKPD dalam menyusun laporan keuangan daerah yang berakibat menjadi tidak efektifnya pelaksanaan reviu.

Berdasarkan hasil analisa SPSS di atas, $F_{hitung} (66,791) > F_{tabel} (3,187)$ dan nilai signifikansi $(0,000) < 0,05$, maka H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa implementasi dan pengawasan secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas kinerja inspektorat dalam reviu Laporan Keuangan Daerah di

inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2013.

Pada penelitian ini penulis tidak menemukan adanya kesenjangan antara teori dengan kondisi yang ada dilapangan, dimana efektivitas kinerja inspektorat dalam reviu laporan keuangan daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya implementasi sistem akuntansi keuangan daerah dan pengawasan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai faktor-faktor yang diteliti pada penelitian ini.

E. KESIMPULAN

1. Ada hubungan linier antara implementasi pelaksanaan Sistem Akuntansi daerah secara parsial dengan efektivitas kinerja inspektorat dalam reviu Laporan Keuangan Daerah di inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2013 dengan hasil analisis data diperoleh skor $t_{hitung} (2,773) > t_{tabel} (2,002)$ atau signifikansi $(0,029) < 0,05$. Pengaruh implementasi terhadap efektivitas kinerja inspektorat dalam reviu Laporan Keuangan Daerah 0,344 atau 34,4%.
2. Ada hubungan linier antara pengawasan sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial dengan efektivitas kinerja inspektorat dalam reviu Laporan Keuangan Daerah di inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2013 dengan hasil analisis data diperoleh

skor t_{hitung} (4,310) > t_{tabel} (2,002) atau signifikansi (0,000) < 0,05. Pengaruh implementasi terhadap efektivitas kinerja inspektorat dalam reviu Laporan Keuangan Daerah 0,344 atau 34,4%.

3. Ada hubungan linier antara pengaruh dan pengawasan secara bersama-

DAFTAR PUSTAKA

- Aguilar, Omar, 2003, *How strategic performance management is helping companies create business value*, *Journal of Strategic Finance*, Vol: 84 Iss: 7, hal: 44.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2007. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 01 tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Jakarta.
- Bastian, Indra, 2006, Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi: 2, hal 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Baswir, Revrison, 2000, Akuntansi Pemerintahan Indonesia, Edisi Tujuh, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE) UGM, Jokjakarta.
- Ghozali, Imam, 2005, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi 3, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul, 2007, Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi: 3, Jakarta.
- Nur Arfiah, Nunuy. (2009). Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mardiasmo, 2002, Akuntansi Sektor Publik, Edisi Pertama. Penerbit Andi, Yogyakarta. 65
- sama terhadap efektivitas kinerja Inspektorat dalam reviu Laporan Keuangan Daerah di inspektorat Kabupaten Cirebon Tahun 2013, dimana F_{hitung} (66,791) > F_{tabel} (3,187) dan nilai signifikansi (0,000) < 0,05 dengan koefisien determinasi sebesar 70,1.
- Mustofa Kamal, 2012. Sinergi Reviu dan Audit Laporan Keuangan. Jakarta: Pusdiklatwas BPKP.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
-, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
-, Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
-, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
-, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerahcq. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
-, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
-, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang

- Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
-, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
-, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Sedarmayanti, 2008. Tata kerja dan produktivitas. Jakarta : Mandar Maju.
- Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2007, reviu Laporan Keuangan Daerah, Cetakan pertama, Tangerang.
- Sugiono, 2008, Metode penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D, Edisi Revisi, Cetakan ke16, Alfabeta, Bandung
- Suseno (2010). Eksistensi BPKP dalam Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi: Fisip UI.